

ABSTRAK

Kebijakan *Shaosu Minzu* dan Dokumen No.7 Tahun 1986 merupakan kebijakan perintis akan pelanggaran HAM terhadap etnis-etnis minoritas di Tiongkok. Salah satu etnis minoritas yang terkena dampak kebijakan ini adalah Etnis Uighur sebagai salah satu kelompok etnis muslim minoritas yang tinggal di daerah otonomi Xinjiang. Pelanggaran HAM yang dialami oleh Etnis Uighur antara lain pembatasan hak dalam sektor hukum dan sosial. Pelanggaran HAM berat pada Etnis Uighur di Xinjiang meliputi pembatasan berpakaian Muslim dan penggunaan fasilitas masjid, hingga didirikannya kamp konsentrasi oleh Pemerintah Tiongkok tahun 2017 mendapatkan banyak perhatian dari berbagai elemen masyarakat internasional, salah satunya yaitu Amerika Serikat. Dalam penelitian ini diteliti bagaimana Amerika Serikat kemudian mengeluarkan kebijakan luar negerinya yang berorientasi *freedom agenda*, terkait dengan isu pelanggaran HAM Etnis Uighur di Xinjiang pada tahun 2017-2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan level analisis berada di tingkat negara.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kebijakan Amerika Serikat, Etnis Uighur.

ABSTRACT

The Shaosu Minzu Policy and Document No.7 of 1986 were the pioneer policies on human rights violations against ethnic minorities in China. One of the ethnic minorities affected by this policy is the Uyghurs, who are a minority Muslim ethnic group living in the Xinjiang autonomous region. Human rights violations experienced by ethnic Uyghurs were restrictions on their law and social rights. The gross human rights violations against ethnic Uyghurs in Xinjiang such as restrictions on Muslim dress and use of mosque facilities, also the establishment of concentration camps by the Chinese government in 2017 – has received a lot of attention from the international community, especially the United States. This study analyze how United States issued a foreign policy oriented to a freedom agenda, related to the issue of Uyghur ethnic human rights violations in Xinjiang in 2017-2019. This study is using qualitative method study with descriptive approach in the state level of analysis.

Keyword: Human Rights, United States Policy, Uyghur.

